

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Senin, 31 Desember 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman 17)	Senin, 31 Desember 2018	Segera Bangun Huntara	Sebagian besar posko bagi pengungsi tsunami adalah gedung sekolah. Pada 7 januari nanti mulai ada kegiatan belajar mengajar. gedung itu perlu dikosongkan.
2	Kompas (Halaman 17)	Senin, 31 Desember 2018	Pascabencana Sulteng: Masalah Air bersih belum teratasi	Kekurangan air bersih menjadi masalah utama di hunian sementara yang sebagian telah ditempati penyintas gempa bumi di kota Palu. mereka berharap hal tersebut segera diselesaikan karena ini kebutuhan vital.
3	Koran Tempo (halaman 5)	Senin, 31 Desember 2018	Pemerintah Daerah Merancang Hunian Sementara	Pemerintah daerah yang terkena dampak bencana Tsunami di Banten dan Lampung tengah merancang pembangunan hunian sementara bagi korban bencana.
4	Media Indonesia (halaman 13)	Senin, 31 Desember 2018	Infrastruktur Kerakyatan Jadi Prioritas	Di indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah tentu tidak bisa bergantung pada APBN
5	Media Indonesia (halaman 14)	Senin, 31 Desember 2018	Rest Area Tol Trans Jawa Pacu Ekonomi Rakyat	Kehadiran Kuliner di rest area tol Trans-Jawa dengan menjajakan makanan khas daerah sekitar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.
6	Media Indonesia	Senin, 31 Desember 2018	Belajar Berdampingan dengan Bencana	Edukasi akan mitigasi bencana kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini sehingga masyarakat bisa paham bagaimana hidup berdampingan dengan bencana
7	Kompas (halaman 2)	Senin, 31 Desember 2018	Bangunan di Pesisir Banten akan Dibongkar	Bangunan di pesisir pantai Banten akan dibongkar karena menyalahi aturan. hal tersebut juga bagian dri mitigasi bencana setelah tsunami selat sunda.
8	Media Indonesia	Senin, 31 Desember 2018	Wisatawan diminta waspadaai wisata pantai	Masyarakat diminta menyimak informasi tunggal dari BMKG dan BPBD yang kebenarannya mendekati
9	Bisnis Indonesia (halaman 12)	Senin, 31 Desember 2018	Tol Trans Sumatera: OKI jadi pusat Ekonomi	Kabupaten OKI Sumsel berpotensi menjadi pusat perekonomian baru di Sumatera lantaran wilayah ini berada di perlintasan jalan tol trans sumatera yang menghubungkan Lampung-Pekanbaru
10	Bisnis Indonesia (halaman 13)	Senin, 31 Desember 2018	Berita foto	Warga melintas di atas jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR di Koto, Agam, Sumbar

Judul	Segera Bangun Huntara	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman 17)		
Resume	Sebagian besar posko bagi pengungsi tsunami adalah gedung sekolah. Pada 7 Januari nanti mulai ada kegiatan belajar mengajar. gedung itu perlu dikosongkan.		

Segera Bangun Huntara

Sebagian besar posko bagi pengungsi tsunami Selat Sunda adalah gedung sekolah. Pada 7 Januari nanti mulai ada kegiatan belajar mengajar. Gedung itu perlu dikosongkan.

PANDEGLANG, KOMPAS — Pembangunan hunian sementara untuk penyintas bencana tsunami Selat Sunda mendesak karena kebanyakan dari mereka menggunakan sekolah sebagai posko pengungsian. Padahal, aktivitas belajar mengajar di sekolah dimulai pada 7 Januari 2019.

Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Medi Herlianto mengatakan, terdapat 51 sekolah di Pandeglang yang saat ini dijadikan lokasi pengungsian. Karena itu, hunian sementara (huntara) menjadi kebutuhan mendesak. "Jika sekolah dimulai 7 Januari, kan, bakal terganggu kalau bangunannya masih dipakai warga jadi pengungsian," kata Medi.

Menurut Medi, huntara perlu dibangun karena rumah warga yang diterjang tsunami mengalami kerusakan permanen dan jumlah bangunan yang rusak lebih dari 400 unit. Padahal, pembangunan huntara memerlukan waktu. "Huntara menjadi penting supaya masyarakat cepat pulih," ucap Medi.

Ukuran setiap unit huntara bervariasi, tetapi seluas 12 meter persegi. BNPB telah meminta pemerintah daerah setempat segera menentukan lahan untuk pembangunan huntara dan melakukan pendataan penyintas.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengungkapkan, dinas terkait menemukan lahan berpotensi yang dapat digunakan membangun huntara. Masih dilakukan upaya pendekatan untuk penggunaan lahan dengan sistem pinjam pakai selama 6-24 bulan. Lahan itu merupakan milik perorangan.

Irna memastikan, tahap pertama akan dibangun 50 huntara di Kecamatan Sumur dengan sumber dana dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. "Sudah disurvei sehingga pembangunan dapat dilakukan. Selain Kementerian BUMN, kementerian lain ataupun lembaga siap untuk membangun hunian sementara. Tentunya perlu proses, terutama verifikasi data dan kelengkapan nya termasuk lahan," kata Irna.



KOMPAS/BINTI ARYANTO NUGROHO

Sampah dari para pengungsi tertumpuk di belakang SD Negeri Tembong I, Tembong, Carita, Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu (30/12/2018). Dibutuhkan penanganan dengan segera terhadap sampah dari pengungsian ini agar tidak menimbulkan penyakit.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan survei ke sejumlah lokasi yang dapat digunakan untuk huntara. Lokasi itu berada di Kecamatan Carita di Desa Sukarame, Sukanagara, dan Carita, baik itu lahan milik desa maupun perorangan. "Lahan milik desa jika akan dibangun hunian sementara relatif lebih mudah pengurusannya, sedangkan lahan perorangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik," ucap Syarif.

Sementara itu, masih banyak penyintas tsunami yang belum mengetahui informasi mengenai huntara. Namun, mereka bersedia tinggal asal bangunannya cukup layak.

Rukmana (50), warga Kampung Sambolo, Desa Sukarame, Carita, mengatakan mau pindah ke huntara asalkan nyaman dan aman untuk ditinggali dan tersedia fasilitas air bersih.

Revisi APBD

Di Lampung Selatan, Lampung, pemerintah daerah setempat berencana merevisi APBD 2019 untuk membantu pembiayaan relokasi warga pesisir selatan Lampung yang terkena dampak bencana. Menurut Kepala Bappeda Lampung Selatan Wahidin Amin, pihaknya akan merevisi APBD 2019 guna membiayai upaya relokasi permukiman pesisir selatan yang terdampak tsunami. Meski Perda APBD 2019 telah disahkan pada akhir

November 2018, peluang revisi masih terbuka karena ada kejadian luar biasa sehingga tidak perlu menunggu APBD Perubahan 2019.

"Mungkin butuh dukungan dari kami juga selain dari pemerintah pusat dan provinsi untuk relokasi. Ini yang perlu kami koordinasikan," kata Wahidin di Lampung Selatan, Minggu.

Menurut Wahidin, saat ini pihaknya masih menghitung anggaran yang dibutuhkan upaya relokasi sambil menunggu pemutakhiran data kerusakan rumah warga. Berdasarkan data terakhir, jumlah rumah rusak berat di Lampung Selatan sebanyak 544 unit, terbanyak di Desa Way Muli Timur 134 unit dan Desa Kunjir 115 unit.

"Secara teknis, anggaran masih kami hitung," ujarnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pun masih mencari lokasi yang tepat untuk relokasi permukiman warga pesisir. Wahidin menuturkan, pemerintah kabupaten sebetulnya sudah memiliki lahan seluas 5 hektar di perbukitan sekitar Kecamatan Kalianda yang dapat digunakan untuk kepentingan ini. Akan tetapi, pihaknya masih mencari alternatif lokasi sebab sebagian besar warga yang berpotensi direlokasi bermata pencaharian sebagai nelayan.

Korban hilang

Secara terpisah, pencarian korban hilang tsunami Selat Sunda terus dilakukan. Personel dari badan pencarian dan pertolongan nasional (Basarnas) masih mencari delapan orang yang hilang di tiga lokasi di Pandeglang, yakni di kawasan Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Labuan, dan Kecamatan Sumur.

Kepala Kantor Basarnas Banten Muhammad Zaenal Arifin mengatakan, dua korban sedang dicari di Labuan, dua orang di Tanjung Lesung, dan empat orang di Sumur. "Hampir semua korban hilang adalah warga setempat. Hanya korban di Tanjung Lesung yang diyakini hilang saat berwisata," kata Zaenal.

Menurut Zaenal, cuaca ekstrem selalu menjadi kendala dalam pencarian. Selain itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga sedang meningkat dengan status Siaga. "Kami harus memikirkan keselamatan. Potensi tsunami juga harus kami waspadai," ujar Zaenal.

Berdasarkan data BNPB hingga Minggu (30/12/2018), bencana tsunami Selat Sunda mengakibatkan 431 orang tewas, 7.200 orang luka-luka, dan 46.646 warga mengungsi. Daerah terparah terdampak di Pandeglang dengan korban tewas sebanyak 292 orang dan 33.136 orang mengungsi.

(ILO/BAY/NIA/MTK/SPW/IGA/E30/E37)

Judul	Pascabencana Sulteng: Masalah Air bersih belum teratasi	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Kompas (Halaman 17)		
Resume	Kekurangan air bersih menjadi masalah utama di hunian sementara yang sebagian telah ditempati penyintas gempa bumi di kota Palu. mereka berharap hal tersebut segera diselesaikan karena ini kebutuhan vital.		

PASCABENCANA SULTENG

Masalah Air Bersih Belum Teratasi

PALU, KOMPAS — Kekurangan air bersih menjadi masalah utama di hunian sementara yang sebagian telah ditempati penyintas gempa bumi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penyintas berharap masalah itu segera diatasi karena kebutuhan vital.

"Tiga hari terakhir ini, unit kami kehabisan air. Kami mengambil air di unit lain yang penghuninya belum banyak," kata Ani (32), penyintas yang menempati hunian sementara (huntara) di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Minggu (30/12/2018).

Pengambilan air dari unit lain itu hanya untuk menalangi kebutuhan air dengan volume kecil, seperti memasak. Apabila kebutuhan air banyak, seperti untuk mencuci pakaian dan mandi, air diambil di rumah anggota keluarga di luar huntara. Air diambil dengan jeriken menggunakan sepeda motor.

Ia menuturkan, sejak menempati huntara pada 19 Desember, petugas baru dua kali mengisi air di tangki-tangki di huntara. Air diangkut lima mobil tangki. Pengisian terakhir dilakukan pada Selasa (25/12).

Syamso (69), penyintas lain, menuturkan, penghuni tidak tahu harus menyampaikan ke siapa dan ke mana soal krisis air. Selama ini tidak ada petugas yang datang untuk menampung keluhan atau menanyakan masalah di huntara. "Tidak mungkin begini terus. Saat penghuni masih sedikit saja air jadi masalah, bagaimana kalau semua kamar ditempati," katanya.

Huntara di Silae menampung penyintas gempa dan tsunami di pesisir Teluk Palu. Rumah dan tempat usaha mereka disapu. Tiga dari 10 huntara Silae sudah ditempati warga dengan jumlah 40 keluarga. Setiap keluarga menempati satu bilik/kamar huntara. Satu unit huntara terdiri dari 12 bilik/kamar dilengkapi dengan empat kamar mandi, empat toilet, dua keran untuk mencuci, dan satu dapur umum. Dua tangki air disediakan untuk setiap unit.

Rudy dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan sudah memilih koordinator setiap kompleks atau unit huntara. Dia yang melapor atas kekurangan di huntara, termasuk air. "Kami sudah perintahkan koordinator memantau setiap hari kondisi huntara, termasuk kekurangan air," katanya.

Pemerintah Provinsi Sulteng juga telah menetapkan empat daerah relokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala. Dua lokasi di Kota Palu, yakni Kelurahan Tondo-Talise dan Duyu; Desa Pombewe untuk Sigi; satu titik di Kecamatan Sirenja untuk Donggala.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyatakan telah menandatangani surat keputusan terkait penetapan lahan relokasi penyintas itu. Lokasi itu aman dari ancaman kehancuran tsunami dan likuefaksi.

Namun, arkeolog yang juga Wakil Kepala Museum Sulawesi Tengah Iksam meragukan, bahkan tidak sependapat dengan ditetapkannya Duyu sebagai lahan relokasi tetap. Alasannya, dalam bahasa Kaili, bahasa suku Kaili yang menempati Lembah Palu, *duyu* artinya longsor. "Berdasarkan penamaan itu, saya menilai Duyu pun tidak aman (untuk lokasi hunian tetap), terutama dari likuefaksi," katanya.

Saat gempa bumi lalu, banyak rumah di Kelurahan Duyu retak. Sebagian tanah dan jalan aspal merekah dan terangkat. Kompleks Perumnas Balaroa yang menjadi salah satu titik likuefaksi berada tidak jauh dari Kelurahan Duyu. Topografi Balaroa dan Duyu mirip, yakni miring dari barat ke timur. (VDI)

Judul	Pemerintah Daerah Merancang Hunian Sementara	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Koran Tempo (halaman 5)		
Resume	Pemerintah daerah yang terkena dampak bencana Tsunami di Banten dan Lampung tengah merancang pembangunan hunian sementara bagi korban bencana.		



Kapal nelayan yang terbawa ke darat akibat diterjang tsunami di pesisir Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, 26 Desember lalu.

Pemerintah Daerah Merancang Hunian Sementara

Rencana relokasi membutuhkan proses lebih panjang.

Larissa Huda

larissahuda@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah daerah di lokasi yang terkena dampak tsunami Banten dan Lampung tengah merancang pembangunan hunian sementara bagi korban bencana Sabtu dua pekan lalu. "Saat ini sedang didata lahan mana saja yang bisa digunakan sebagai calon lokasi hunian (hunian sementara)," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat, kepada *Tempo*, kemarin.

Syarif mengimbau agar warga tidak berkegiatan di pesisir hingga radius 1 kilometer dari bibir pantai.

Menurut dia, pembangunan hunian sementara merupakan upaya sebelum rencana relokasi masyarakat secara permanen terealisasi. Penentuan lokasi permanen untuk relokasi, kata dia, harus melalui mekanisme legal formal

yang panjang dan memastikan tak ada persoalan di kemudian hari. Adapun pendataan saat ini dilakukan terhadap rumah warga yang rusak, dari yang ringan hingga berat.

Syarif belum bersedia memaparkan detail lokasi pembangunan hunian sementara ataupun kelak tempat relokasi. Pemerintah, kata dia, masih perlu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan satuan kerja perangkat daerah (dinas). Kajian juga meliputi kawasan yang terkena dampak untuk menilai masih layak atau tidaknya ditinggali masyarakat. "Lokasinya sedang dikaji. Takut kalau diletakkan salah, lalu air malah datang. Itu kan jadi bahaya. Jadi, minimal lokasinya harus aman dan nyaman," kata dia.

Kepala Dusun Sumberjaya di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, Epi Saepi, menuturkan warga

dusun telah bersedia untuk direlokasi ke kawasan yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat, kata Epi, memahami pemindahan ini bukan sebagai upaya mengusir atau mengusur, melainkan demi mencegah terjadinya dampak tsunami yang lebih besar di masa mendatang.

Menurut dia, ada sekitar 250 keluarga di dusunnya. Sebagian besar, sebanyak 820 orang, merupakan nelayan. Epi menilai saat ini merupakan waktu yang pas untuk memindahkan tempat tinggal para korban. "Lebih baik sekarang, jadi waktunya tepat, mereka tidak keburu membangun rumah dulu. Asal tempatnya layak," kata Epi.

Rencana relokasi sebelumnya diungkapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain untuk mengantisipasi terjadinya bencana tsunami susulan, pemindahan rumah warga dinilai harus dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran pendirian bangunan di sempadan pantai. Ketentuan ini tak hanya menghitung aspek

sosial dan ekonomi, tapi juga kerawanan bencana.

Di Banten, misalnya, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan garis sempadan hingga 100 meter dari bibir pantai yang tidak diperkenankan untuk pendirian hunian. Nyatanya, rumah warga banyak ditemukan hanya

berjarak 5 meter dari pantai yang menghadap langsung ke Gunung Anak Krakatau.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengiyakan adanya indikasi pelanggaran tata ruang pada permukiman warga dan beberapa vila di pesisir barat Banten. Kajian Risiko Bencana Banten 2016–

2020 menyatakan wilayah tersebut berisiko tinggi terhadap bencana. "Dari hasil kajian diketahui bahwa kelas bahaya tsunami tergolong tinggi," kata Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementerian Agraria, Reny Windyawati.

● FALAN PERBANTO | GHODA RAHMAN

Data dari Selat Sunda

Tubuh Gunung Anak Krakatau telah berubah akibat erupsi yang tak kunjung berhenti. Berdasarkan pengamatan visual dan pengukuran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM, tinggi Gunung Anak Krakatau yang semula 338 meter saat ini hanya 110 meter. Adapun jumlah korban dalam bencana tsunami di pesisir Banten dan Lampung yang dipicu longsor erupsi gunung tersebut, akhir pekan lalu, terus bertambah. Berikut ini data Anak Krakatau dan korban tsunami per 29 Desember:

■ KONDISI GUNUNG ANAK KRAKATAU

Status: Siaga (Level III)
Volume tersisa: 40–70 juta meter kubik
Intensitas erupsi: 9 letusan per menit
Radius aman: >5 kilometer dari kawah
Potensi bahaya:
- Letusan bertipe surtseyan atau magma yang keluar langsung bersentuhan dengan air laut.
- Dengan sisa volume hanya 40–70 juta meter kubik, potensi tsunami kecil.

■ KORBAN DAN KERUSAKAN



431
orang
Meninggal



7.200
orang
Luka-luka



15
orang
Hilang



46.646
orang
Mengungsi



1.527
unit Rumah
rusak berat



70
unit Rumah
rusak sedang



181
unit Rumah
rusak ringan



78
unit Penginapan
dan warung rusak



434
unit
Perahu nelayan
dan kapal
penyeberangan
rusak

■ MASA TANGGAP DARURAT

- Provinsi Banten: 27 Desember 2018–9 Januari 2019
- Kabupaten Pandeglang: 22 Desember 2018–4 Januari 2019
- Kabupaten Serang: 22 Desember 2018–4 Januari 2019
- Kabupaten Lampung Selatan: 23–29 Desember 2018

● LARISSA HUDA | SUMBER: BNPB, KEMENTERIAN ESDM

Judul	Infrastruktur Kerakyatan Jadi Prioritas	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Media Indonesia (halaman 13)		
Resume	Di Indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah tentu tidak bisa bergantung pada APBN		

Infrastruktur Kerakyatan Jadi Prioritas

Di Indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah tentu tidak bisa bergantung hanya pada APBN.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

INFRASTRUKTUR kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan program padat karya irigasi kecil masih terus menjadi program prioritas pemerintah di tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan prasarana tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, tol, jembatan bentang panjang, dan bendungan.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi jadi akan tetap menjadi prioritas. Perbaikan irigasi kecil melalui program padat karya tunai juga terus dilaksanakan agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," ujar Basuki, kemarin.

Menurut Basuki, di Indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah tentu tidak bisa bergantung hanya pada APBN. "Maka dari itu, kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengembang, dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini," tuturnya.

Kementerian PU-Pera membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya, atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi MBR.

Setiap tahun Kementerian PU-Pera memperbaiki sekitar 160 ribu rumah tidak laik huni (RTLH) melalui BSPS. Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk modal perbaikan.

Bendungan di NTT

Selain perumahan, Kementerian PU-Pera tahun depan menargetkan kembali membangun satu bendungan lagi, yaitu Bendungan Welikis yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. "Ada satu bendungan lagi yang akan dibangun pemerintah pusat di Kabupaten Belu sehingga nantinya akan ada dua bendungan di Belu," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh kepada wartawan di Kupang, seperti dikutip *Antara*, Sabtu (29/12).

Menurut Andre, desain bendungan tersebut sudah mulai disiapkan dan jika itu sudah selesai, proyek pembangunan bendungan tersebut bisa langsung dilelang.

Tambahan bendungan untuk Kabupaten Belu sesuai dengan janji dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Hari Suprayogi saat melakukan pengisian air untuk pertama kali di Bendungan Rotiklot.

"Bendungan Rotiklot kan sudah selesai dan satu lagi Welikis akan dibangun juga di wilayah perbatasan itu. Artinya bahwa pembangunan itu juga bertujuan untuk memenuhi kuota tujuh bendungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo," tambah dia. (E-2)

Judul	Rest Area Tol Trans Jawa Pacu Ekonomi Rakyat	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Media Indonesia (halaman 14)		
Resume	Kehadiran Kuliner di rest area tol Trans-Jawa dengan menjajakan makanan khas daerah sekitar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.		

Rest Area Tol Trans-Jawa Pacu Ekonomi Rakyat

Kehadiran kuliner di rest area Tol Trans-Jawa dengan menjajakan makanan khas daerah sekitar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.

CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan keberadaan 61 tempat peristirahatan pengemudi (*rest area*) di sepanjang Tol Trans-Jawa akan membangkitkan ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui program peta kuliner yang menghadirkan keaneka-

ragaman makanan khas di daerah sekitar rest area.

"Ada tugas dari Pak Presiden kepadanya bahwa konektivitas itu harus. Namun, konektivitas seperti apa? Yang *deliver*. Konektivitas yang *deliver* itu punya arti bagi masyarakat. Pertama, berfungsi sebagai sarana perhubungan dan membangkitkan ekonomi masyarakat di kota-kota yang dilalui," kata Budi saat meninjau Rest Area Km 207A Tol Palikanci, Sabtu (29/12).

Menurut dia, kehadiran kuliner di *rest area* dengan menjajakan makanan khas daerah sekitar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar Tol Trans-Jawa. Pengguna jalan juga bisa merasakan pengalaman baru dan merasa nyaman dalam perjalanan.

Budi mengatakan masyarakat dapat mengunduh Peta Kuliner Trans Jawa dari Kementerian Perhubungan melalui laman <http://habitat.dephub.go.id/speial-kanten/dokumen-publikasi/umum/2671-peta-kuliner-trans-jawa>.

"Nah, oleh karenanya, saya bersemangat sekali bahwa kuliner ini harus dibukakan karena saya, kalau ke pergi

Menhub berharap agar Jasa Marga memperluas tempat parkir sehingga bisa meningkatkan daya tampung saat kepadatan arus lalu lintas tinggi.

kota-kota tertentu, yang dicari adalah kuliner. Nah, kalau kuliner ini bangkit, banyak sekali orang punya kesempatan untuk

berkerja. Mereka punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis," tambah Menhub.

Saat ini terdapat 61 rest area di sepanjang ruas Tol Trans-Jawa. Jumlah itu dianggap cukup untuk memfasilitasi para pengendara beristirahat. Namun, Menhub berharap agar Jasa Marga memperluas tempat parkir sehingga bisa meningkatkan daya tampung saat kepadatan arus lalu lintas tinggi seperti musim mudik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

"Sekarang ini setiap 15 km ada (*rest area*). Jadi, ada 61 rest area. Kita lihat memang pada hari-hari biasa atau libur seperti ini tidak ada masalah. Namun, saat Lebaran memang

kurang tempatnya, harus disiasati dengan menambah tempat parkir. Jadi, kalau saya bilang, tetap segini dulu, tapi tempat parkirnya diperluas supaya saat Lebaran daya tampungnya lebih banyak," pungkas Budi.

Penyesuaian

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresumikan tujuh ruas tol yang merupakan bagian dari Trans-Jawa. Kotajauh ruas itu meliputi tol Pemalang-Batang seksi 1-2 (34 km), Batang-Semarang seksi 1-5 (75 km), Semarang-Solo segmen Salatiga-Kartasura (33 km), Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono (38 km), Kertosono-Mojokerto segmen Bandar-Kertosono (11

km), Porong-Gempol segmen Porong-Kejapuran (6 km), dan Gempol-Pasuruan segmen Pasuruan-Ganti (14 km). Dengan begitu, kini sudah tersambung Tol Trans-Jawa sepanjang 933 km mulai Merak ke Surabaya, bahkan hingga Pasuruan.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyarto menyatakan untuk jarak pendek, pada setiap ruas, penghitungan tarif disesuaikan nilai investasi. Secara rata-rata, tarif yang dibayarkan Rp1.000 per kilometer. Namun, akan ada penyesuaian tarif bagi angkutan logistik yang melintasi Tol Trans-Jawa dengan jarak tempuh panjang. (PriaE-3)

Judul	Belajar Berdampingan dengan Bencana	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Media Indonesia		
Resume	Edukasi akan mitigasi bencana kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini sehingga masyarakat bisa paham bagaimana hidup berdampingan dengan bencana		

Belajar Berdampingan dengan Bencana

Edukasi akan mitigasi bencana kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini sehingga masyarakat bisa paham bagaimana hidup berdampingan dengan bencana.

Rizky Noor Alam
rizky.noor@mediaindonesia.com

HIDUP berdampingan dengan bencana seakan takdir bagi masyarakat Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya alam ini berdiir di atas rangkaian cincin api Pasifik atau istilah lainnya The Pacific Ring of Fire yang masih aktif melingkari dari Belanda baru hingga Amerika Selatan. Atas dasar itu gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami kerap menghampiri negeri ini.

Dalam sepekan ini pulsi dari gempa bumi di Lombok serta tsunami di Palu dan Donggala, baru-baru ini tepatnya 22 Desember 2018, tsunami kembali menerjang Indonesia di perairan Lampung dan Banten akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang memakan korban. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan Indonesia menghadapi bencana? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan ahli vulkanologi, Surono di Jakarta, Kamis (27/12).

Dari kasus tsunami ini, bagaimana Anda melihat sistem deteksi dini bencana terkait gunung berapi yang dimiliki Indonesia saat ini?

Indonesia ini dikuruni Tuhun gunung api terbanyak. Ada 127 gunung api yang aktif di Indonesia atau sekitar 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Bahkan letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern manusia berada di Indonesia, yaitu letusan Gunung Tambora, Nawa Tenggara, pada 1815 yang sejauh ini sampai ke Eropa.

Jadi (Indonesia) kalau dibanding slip yang slip kalau dibanding gunung api itu, karena subjek dari mitigasi bencana itu adalah manusia dan yang terkait dengan manusianya. Di Indonesia sekitar 4 juta jiwa masyarakat Indonesia bermukim dan beraktivitas di daerah rawan bencana gunung api dan berisiko terkena dampak bencana gunung api.

Belum lagi masalah gempa bumi dan tsunami (jumlah masyarakat yang tinggal berdampingan dengan bencana tersebut) sekitar 140 juta jiwa, lalu longsor, dan kemungkinan terdapat banjir bandang sekitar 40 juta jiwa. Jadi di mana gunanya itu, gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor pasti ada kerhan atau paling tidak pengungsian banyak. Bisa dicatat letusan Gunung Merapi pada 2010 ada 1 juta pengungsi, yang dipimpin pemerintah atau masuk tenda itu sekitar 417 ribu orang dan meninggal 365 orang, kerugiannya mencapai belasan triliun.

Jadi saya yakin karena ada penelitian. Tapi teknologi tidak punya arti apa-apa kalau masyarakatnya tidak mengerti tentang ancaman bahaya gunung api dan cara mengantisipasi, jadi percuma. Kesiapan masyarakat yang menurut saya masih kurang. Walaupun waktu letusan Gunung Merapi 2010, saat saya masih menjadi pejabat saat buat Mofl dengan 4 bupati di sekitar Merapi untuk wajib latihan sehingga saat terjadi peningkatan aktivitas Merapi masyarakat bisa mengungsi dengan cara-cara yang sudah dilatih, tapi ingun masih ada korban.

The German Research Center for Geosciences mampu mendeteksi gempa pukul 26.00 sebelum tsunami Selat Sunda, tapi apa itu tsunami? Bagaimana alat deteksi gempa di luar negeri mampu deteksi gempa lebih awal dibandingkan kita?

Peralatan kita kalau harus cukup sekali ini, di samping masalah perawatannya tidak murah. Saya mengalami di gunung api itu vandalisme, dicuri, dirusak sering sekali.

Saya mengatakan kejadian tsunami di Palu ada missed bagi BMKG dan kita harus benar-benar mengatakan hal itu. Di Selat Sunda juga ada loga-

gan. Teman saya di Carita menyatakun pada saya air laut begini dan saya jawab berdasarkan laporan BMKG di Twitter. Lalu, teman saya bilang mobil-mobil terbuawa arus, itu adalah tsunami. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu karena bukan kewenangan saya lagi, dan hal itu dilayangkan air pasang naik karena bulan purnama.

Seolah itu, Jerman mengomentari, data-data beresam di media sosial. Jangan kita bicara data dari Jerman, data dari instansi di Indonesia juga ada. Seperti dari Badan Informasi Geospasial itu memang alat yang memantau titik-titik gunung api di laut di pantai Banten dan Lampung. Alat itu mereka waktu gelombang itu datang. Karena tsunaminya akibat gelombang itu-tiba maka besar polanya tidak seperti air surut dulu baru datang air besar. Artinya kita jangan bicara BMKG tidak ada, sedangkan pasang surut itu dipasang di Anak Krakatau atau pulau sebelahnya maka tsunami itu terdeteksi secara dini.

Sementara itu, kalau cerita dari Jerman terdeteksi gempa pukul 21.03 dan tsunaminya sampai di darat pukul 21.27. Artinya, ada sekitar 20 menit, kalau pemerintah punya early warning atau sirene sebelumnya bisa bunyi pada saat gelombang diterima di pantai.

“Subjek mitigasi itu bukan adanya peralatan atau tidak, melainkan bagaimana masyarakat di edukasi sejak dini tentang kondisi daerahnya.”

Tapi kalau hal itu sudah diibaratkan akibat pasang naik bulan purnama masyarakat jadi bingung. Artinya ini tidak ada kepastian dari institusi pemerintah yang menangan hal itu. Jadi kita harus mengahai hal itu, supaya kita bisa memperbaiki tsunami terkait gunung api, tidak hanya letusan gunung api. Tsunami akibat letusan gunung api itu ada 3, pertama letusan gunung harus dihayati karena Anak Krakatau maka letusan gunung harus dihayati bahkan sampai hilangnya Anak Krakatau dan jika terjadi letusan gunung bisa terdengar sampai Jakarta dan adanya tinggi gelombang dan itu tidak ada.

Kedua, awan panas. Anak Krakatau tidak memproduksi awan panas skala besar, tidak ada awan panas jutaan meter kubik yang memicu tsunami dan paling mungkin ialah longsor.

Kita jangan mengriminalisasi Anak Krakatau karena dari dua letusan gunung seperti itu tidak pernah besar. Bisa dibuktikan sejak 1927 sampai sekarang Krakatau lebih banyak aktivitas dibandingkan tsunaminya.

Kalau alat warning tsunami dipasang dengan benar, entah itu tsunami karena longsor atau letusan gunung api pasti terdeteksi.

BNPB mengaku belum memiliki alat deteksi longsor gunung berapi besar. Tapi alat warning tsunami dipasang dengan benar, entah itu tsunami karena longsor atau letusan gunung api pasti terdeteksi.

Jangan bilang begitu, kalau tsunami itu karena landslide, maka yang dipantau itu tsunami atau landslide-nya? Mungkin bisa dipasang elektronis kalau itu retak, kalau retakannya semakin lebar maka bisa saja longsor, tapi apakah post longsor kan tidak juga. Yang penting monitoring tsunami, bisa dilakukan karena kepekaannya, gunung api,

atau longsor. Bisa gempa menimbulkan longsor bisa juga tidak, bisa menimbulkan tsunami bisa juga tidak, yang penting bagaimana tsunami itu terdeteksi, jangan menyimpulkan kita tidak bisa mendeteksi tsunami maka tidak bisa mendeteksi tsunami.

Dengan meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, apakah ada kemungkinan meletus seperti Gunung Krakatau pada 1883? Masih jauh kalau itu, kenapa? karena sistemnya masih terbuka, belum ada sumber lavanya juga dan masih meletus dengan strudinal seperti kembang api dan sebagainya. Dia pamer kegagalannya bahwa dirinya itu masih aktif.

Presiden menganggap memasukkan mitigasi bencana ke kurikulum pendidikan. Apakah masyarakat belum paham atau kurang kesadarannya akan mitigasi bencana? Dulu saya teriak-teriak memasukkan hal ini ke muatan lokal ke dinas-dinas pendidikan. Tapi alasan mereka sudah penuh muatan lokal. Saya dulu pernah kerja sama dengan PGRI, sosialisasi di mana-mana bahkan sampai guru-guru TK-mengarang lagu soal gempa bumi, tapi PGRI ternyata tidak akur dengan dinas pendidikan sehingga kerja sama itu hilang.

Apapun itu, terutama mitigasi tanpa pendidikan dan pelatihan maka program mitigasi pasti akan gagal. Contoh di Jepang anak-anak kecil sudah dilatih pakai helm kalau berangkat sekolah, mereka sudah dilatih sejak kecil bahwa merupakan akibat dengan bencana sehingga harus menyelamatkan diri. Di Indonesia pakai helm karena takut ditilang polisi bukan karena keselamatan. Saya bosan mengatakan akan Indonesia itu sudah ada sebelum manusianya dengan dinamikanya gempa, letusan gunung api. Anggap alam sebagai tuan rumah dan kita adalah tamunya, maka selayaknya tamu yang sopan adalah menyesuaikan diri dengan karakter tuan rumah.

Subjek mitigasi itu bukan adanya peralatan atau tidak, melainkan bagaimana masyarakat di edukasi sejak dini tentang kondisi daerahnya, serta bagaimana mengantisipasi jika ancaman bahaya itu datang. Percuma kita melakukan instalasi alat pendeteksi yang mahal kalau masyarakat tidak terdidi.

Bagaimana sistem pemantauan bencana terkait dengan kegempaan kita?

Sebenarnya kalau peta gunung api di Indonesia itu dulu sudah saya selesikan. Belakangan daerah peta memang mengancam mau pun tsunami sudah ada. Misalnya apakah sudah ada peta-peta daerah libutidhi di Palu? itu sudah ada. Tapi seperti saya bilang daerah-daerah rawan bencana itu daerah yang enak untuk ditinggali, bukan berarti daerah rawan bencana tidak boleh ditinggali? Betah tetapi dengan perhitungan risiko yang optimal.

Sampai sekarang, penataan ruang di daerah itu belum memasukkan ancaman bahaya itu, masih memperkirakan kemungkinan tsunaminya, ya tidak. Bisa dibayangkan daerah-daerah pantai seperti di Carita, kalau bisa (buat bangunan) di lebih pantai, sulit juga. Di samping itu yang saya heran soal Sunda itu daerah yang strategis, sangat wisata di dua provinsi, yaitu Banten dan Lampung. Ditambah Cilegon ialah zona industri strategis, dulu waktu saya jadi pejabat saya mengatakan tidak ada alasan apa pun Anak Krakatau tidak terpantau, tidak ada alasan alatnya mati. Ada tantangan yang bisa dipecah karena kakaban pasang di Anak Krakatau sedang terjatuh batu dan pecah, tapi saya heran di daerah yang sevitral itu tidak diusahakan diabaikan early warning tsunami. Karena tsunami di zona potensinya bukan hanya dari Anak Krakatau, melainkan juga



SURONO

Tempat, tanggal lahir
Cilecep, 8 Juli 1955

Istri: Sri Surahmanti

Anak:
1. Amy Rachmawati
2. Bistri Aprilia

Pendidikan

- S-3 Geofisika di Savoie University, Prancis (1993)
- S-2 Geofisika di Grenoble University, Prancis (1989)
- S-1 Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB) (1982)

Karier

- Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM (2014-2015)
- Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (2013)
- Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) (2006-2013)
- Kepala Subdirektorat Mitigasi Bencana Geologi (2001-2006)
- Kepala Vulkanologi (1993-2001)

Penghargaan

1. A Knight of the Legion of Honor in France dari Presiden Prancis (2015)
2. Pengabdian insan Kemendiknas Dharma Widya Arga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2014)
3. Bintang Jasa Utama dari Presiden RI (2011)

gempa yang ada di selat Sunda. Ini betul betul daerah vital strategis yang menghadapi dengan tangan kosong untuk menghadapi suatu ancaman yang besar.

Apakah perlu ada perubahan dan penyusunan terkait dengan sistem itu?

Itu tidak berubah, kecuali jika seperti Merapi tiba-tiba dalam sekejapnya belum pernah awan panas meletus sampai 20 km maka diubah petanya. Bisa disosialisasi jika ada perubahan karakter letusan, kalau tidak ya itu itu saja.

Inbauan bagi masyarakat bahwa kita hidup dekat dengan bencana?

Masyak tidak bisa sendiri, masyarakat perlu pemerintah yang punya kewajiban melindungi masyarakatnya, melindungi dari ancaman bahaya. Selain itu, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan ma-

Meraih Keluarga di Masa Pensiun

SURONO atau yang akrab disapa Mbah Rono bisa dibilang sosok yang banyak berjasa dalam hal kegunungan selama menjabat di berbagai posisi yang menyangkut hal tersebut. Mbah Rono mengaku saat dirinya masih menjadi pejabat, waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat, bahkan keluarga diimpor di rumah. Berkat dedikasinya, Mbah Rono mendapatkan penghargaan bintang jasa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah Prancis.

“Waktu saya menjadi pegawai negeri, urusan saya dengan keluarga itu seles. Rina dibuang urusan keluarga sudah saya serahkan ke istri dan saya mengurus pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Surono kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (27/12).

Kesibukannya melayani masyarakat tersebut sampai membuat dirinya lupa akan ulang tahunnya sendiri maupun sang istri.

“Saya mencoba meraih keluarga saya di masa pensiun ini, saya hanya anak saya yang mendidik perusahaannya swasta. Kalau saya masih sempat dan masih bisa, apa pun yang dibutuhkan masyarakat dari saya, saya akan berikan.”

tanahbanyu. Dalam menjalani hidup sebagai pejabat negara, Mbah Rono mengaku selalu memegang 4 prinsip. Keempat prinsip itu ialah kejujuran, kecerdasan, kecepatan, dan keberanian.

“Kalau masalah jujur, banyak orang jujur, tapi kalau tidak cerdas susah. Kalau cerdas tapi tidak jujur mungkin saya sudah pakai baju oranye mendapatkan penghargaan bintang jasa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah Prancis.”

“Jangan pernah sombong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menguasai alam. Itekt itu hanya membangun jembatan antara alam dan manusia, jembatan ini bisa rusak manakala kita tidak bisa menghayati kemauan alam dengan akal dan hati, itu saja,” pungkasnya. (Riz/M-3)

teknik yang luar biasa untuk mana tanaman tekonik itu bisa menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor.

Jadi, pemerintah wajib melakukan edukasi sejak dini tentang daerah sekatarnya, karakternya seperti apa agar masyarakat bisa menyesuaikan diri. (M-3)

salah kebencanaan sejak dini. Menakutkan kita sudah memberikan pendidikan sejak dini, contoh Anda menggambar pemandangan gunung dengan matahari dan alam yang subur? Itu bagian pendidikan bahwa kita mempunyai gunung api banyak yang memberikan keburukan. Kita mempunyai tanaman

Media Indonesia



TONTON VIDEO NYA DI: mediaindonesia.com

Judul	Bangunan di Pesisir Banten akan Dibongkar	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Kompas (halaman 2)		
Resume	Bangunan di pesisir pantai Banten akan dibongkar karena menyalahi aturan. hal tersebut juga bagian dri mitigasi bencana setelah tsunami selat sunda.		

MITIGASI BENCANA

Bangunan di Pesisir Banten Akan Dibongkar

PANDEGLANG, KOMPAS — Bangunan di pesisir pantai Banten akan dibongkar karena menyalahi aturan. Penertiban bangunan tersebut juga menjadi bagian mitigasi bencana setelah tsunami Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah segera membongkar bangunan tersebut. "Rata-rata permukiman yang rusak diterjang tsunami terlalu dekat dengan pantai. Bahkan, kurang dari 100 meter sehingga tidak sesuai ketentuan," kata Luhut di Labuan, Pandeglang, Banten, Jumat (28/12).

Tidak hanya permukiman, kata Luhut, bangunan lain dalam radius kurang dari 100 meter dari pantai harus dibongkar.

Turut mendampingi Luhut, Bupati Pandeglang Irna Narulita. Irna memastikan akan membongkar semua bangunan ter-

sebut. Walau dalam prosesnya perlu sosialisasi dan pendekatan agar masyarakat memahami bahwa lokasinya di area rawan bencana.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai mengatur bahwa tidak boleh ada bangunan di sepanjang sempadan pantai. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sesuai aturan itu, tidak akan ada lagi bangunan di area sempadan pantai Pandeglang. Pihak perizinan satu pintu dan Satpol PP Pandeglang akan menertibkan pihak-pihak yang tetap nekat melanggar aturan.

Terkait hunian sementara bagi penyintas bencana, Irna menjelaskan, penda mempunyai

anggaran khusus sekitar Rp 700 juta. Dana itu telah dicairkan meski belum tentu mencukupi. "Perlu dukungan dari provinsi dan kementerian ataupun lembaga terkait. Saya akan mengupayakan dana kepedulian sosial dari kementerian untuk membantu pemulihan," katanya.

Persoalannya, wilayah seperti Panimbang tidak memiliki area pegunungan atau perbukitan sehingga masih dicarikan lahan yang tepat untuk relokasi dan hunian sementara. Selain itu, juga harus membuka akses ke area perbukitan untuk hunian sementara, relokasi, dan mitigasi bencana.

Seismometer baru

Secara terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memasang sejumlah seismometer atau alat pendeteksi getaran dan gempa bumi

untuk menggantikan alat lama yang telah rusak.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, alat yang dipasang di gunung itu rusak berkali-kali. Berdasarkan data Tim Tanggap Darurat Letusan Gunung Anak Krakatau Kementerian ESDM, sejak pertengahan 2018, seismometer sudah dipasang tiga kali.

Aktivitas Anak Krakatau menyebabkan dua seismometer rusak pada awal Juni dan satu seismometer rusak pada 22 Desember 2018.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar mengatakan, kini hanya satu seismometer yang dipasang untuk memantau Anak Krakatau. Alat itu dipasang di Pulau Sertung. Seismometer akan dipasang di Pulau Panjang dan Rakata.

(ILO/BAY/MTK/NIA/EI0/EI7)

Judul	Wisatawan diminta waspada di wisata pantai	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Media Indonesia		
Resume	Masyarakat diminta menyimak informasi tunggal dari BMKG dan BPBD yang kebenarannya mendekati		

Wisatawan Diminta Waspada di Wisata Pantai

Masyarakat diminta menyimak informasi tunggal dari BMKG dan BPBD yang kebenarannya mendekati.

RENDY FERDIANSYAH
rendy@mediaindonesia.com

MASYARAKAT yang ingin berwisata atau berlibur memeriahkan malam tahun baru di daerah pantai diminta berhati-hati dan waspada terhadap cuaca ekstrem serta gelombang tinggi.

Peringatan itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatra Barat secara terpisah, kemarin.

"Wisatawan yang mengunjungi wilayah Malang selatan harus lebih waspada dengan cuaca ekstrem saat ini sebab di Kabupaten Malang sering kali terjadi anomali atau ketidakberaturan cuaca, dan gelombangnya cukup tinggi," kata Kepala BPBD Jawa Timur Subhan di Surabaya.

Selain itu, lanjutnya, pengunjung juga mewaspada

kemungkinan banjir dan tanah longsor di musim penghujan ini, terutama di Pujon-Ngantang-Kasembon di Malang barat.

"Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Malang, personel BPBD, PMI, dan relawan SAR juga meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor tersebut," imbuh Subhan.

Peringatan yang sama juga disampaikan BMKG Maritim Teluk Bayur, Sumatra Barat.

"Masyarakat yang tinggal di pesisir Samudra Hindia, pesisir barat Sumatra Barat, atau sekitar Kepulauan Mentawai diminta mewaspada potensi gelombang tinggi 4 meter," ujar prakirawan BMKG Teluk Bayur, Yosyea Oktavindra.

Masyarakat, lanjutnya, juga harus tetap mewaspada potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk wilayah-wilayah yang



Abdul Fatah
Wakil Gubernur Babel

telah mendapat hujan berintensitas tinggi.

"Perahu nelayan, kapal tongkang, feri, dan kapal kargo juga harus waspada gelombang setinggi 2-4 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Samudra Hindia barat Bengkulu," kata Yosyea.

Informasi tunggal

BMKG Minangkabau melansir bahwa hingga hari ini wilayah Sumatra Barat berpotensi diguyur hujan. Masyarakat diminta mewaspada ancaman banjir, tanah longsor, dan banjir bandang.

Hal senada disampaikan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan wakilnya, Abdul Fatah, yang mengimbau masyarakat tetap waspada memantau per-

kembangan cuaca melalui BMKG.

"Saat ini pedoman monitor cuaca hanya dari BMKG. Saya berharap apabila ada peringatan dari BMKG, masyarakat dapat mewaspadainya," ujar Wagub Abdul.

Informasi dari BMKG, imbuhnya, merupakan informasi tunggal dan kebenarannya mendekati.

Karena itu, Wagub meminta BPBD Babel selalu berkoordinasi dengan BMKG dan segera menyampaikan informasi penting yang harus diketahui masyarakat. "Masyarakat agar mewaspada pantai yang langsung berhadapan dengan lautan lepas."

Adapun Gubernur Erzaldi mengimbau masyarakat untuk mengisi malam tahun baru dengan berzikir.

Sementara itu, bencana tsunami yang melanda Selat Sunda beberapa hari lalu ternyata tidak menyurutkan langkah para wisatawan khususnya lokal untuk mengunjungi objek wisata pantai di Pulau Bangka.

Sejumlah objek wisata pantai seperti pantai Pasir Padi, Tikut Emas, Pesona, Rebo, Parai Tenggara, dan Pantai Tonga masih ramai dikunjungi wisatawan. (FL/YH/X-7)

Judul	Tol Trans Sumatera: OKI jadi pusat Ekonomi	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 12)		
Resume	Kabupaten OKI Sumsel berpotensi menjadi pusat perekonomian baru di Sumatera lantaran wilayah ini berada di perlintasan jalan tol trans sumatera yang menghubungkan Lampung-Pekanbaru		

► TOL TRANS SUMATRA

OKI Jadi Pusat Ekonomi

PALEMBANG — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, berpotensi menjadi pusat perekonomian baru di Sumatera lantaran wilayah ini berada pada perlintasan jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan Lampung—Palembang.

Adapun ruas tol Lampung—Kayuagung (OKI) sepanjang 112 km dan Kayuagung—Palembang sepanjang 33 km.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa jalan tol Trans Sumatra diyakini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten OKI.

“Dengan adanya jalan tol, lokasi-lokasi dekat pintu keluar masuk jalan tol pun tentu akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri perdagangan, serta pusat ekonomi rakyat, apalagi yang melalui kabupaten OKI ini terpanjang” katanya, Jumat (28/12).

Deru menambahkan, selain bisa memangkas biaya logistik, jalan tol Trans Sumatra akan membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui. Lebih lanjut, dia menyebutkan, untuk menangkap peluang dari jalan tol Trans Sumatra yang direncanakan beroperasi pada April 2019 mendatang, Bupati OKI Iskandar mendorong lahirnya kewirausahaan sosial dari masyarakat sekitar.

“Tol ini akan memberi *multiplier effect* untuk masyarakat sekitar melalui *rest-rest area* potensi ekonomi masyarakat akan terbantu” katanya.

Iskandar mengusulkan, tempat istirahat di beberapa titik jalur tol Trans Sumatra yang melalui Kabupaten OKI dijadikan tempat jualan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kalau para pedagang diizinkan berjualan di *rest area* jalan tol dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal, diharapkan akan menaikkan omzet masing-masing,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya

Sumadi mengatakan pembangunan Trans Sumatra dapat memacu dan memicu percepatan potensi ekonomi. “Dengan adanya jalan tol Trans Sumatra ini diharapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh wilayah karena distribusi barang dan jasa semakin lancar.”

MALANG—PANDAAN

Sementara itu dari Malang, Jawa Timur, dilaporkan, pengaturan jalan tol fungsional Malang—Pandaan dinilai perlu dievaluasi agar tidak memacetkan arus lalu-lintas, terutama di Lawang—Karanglo.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Fattah Jasin mengatakan bahwa banyaknya kendaraan yang masuk Malang yang berlangsung sampai saat ini menimbulkan kemacetan di jalan raya Lawang—Karanglo. “Atau juga arus lalu lintas dari Surabaya menuju Malang,” katanya di Malang, Rabu (26/12).

Kemacetan itu tidak bisa diurai lantaran hasil rapat Pemprov Jatim, kepolisian dan Direksi Jasa Marga sudah menyepakati tol fungsional Malang—Pandaan pada 26—27 Desember 2018 dikhususkan satu jalur mengarah ke Surabaya. Kemudian pada 28—31 Desember 2018 tol fungsional dikhususkan satu jalur mengarah ke Malang atau Surabaya—Malang, sedangkan pada 1—3 Januari 2019 dikhususkan satu jalur mengarah Surabaya atau Malang—Surabaya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan lalu lintas dari Malang menuju Surabaya justru lengang. Peningkatan kendaraan dari Surabaya ke Malang itu, dia menduga, karena arus liburan Natal dan Tahun Baru.

Warga berbagai daerah ingin berwisata ke Malang dan Kota Batu. Dengan macetnya lalu-lintas, waktu tempuh Surabaya—Malang membutuhkan waktu 5—6 jam dari waktu seharusnya 2—3 jam lantaran macet mulai pintu masuk Malang. (Dinda

Wulandari)

Judul	Berita foto	Tanggal	Senin, 31 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 13)		
Resume	Warga melintas di atas jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR di Koto, Agam, Sumbar		

► JEMBATAN GANTUNG



Antara/Iqgoy el Fitra

Warga melintas di atas jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR di Nagari Guguk Sarjo, IV Koto, Agam, Sumatra Barat, Kamis (27/12). Kementerian PUPR menargetkan membangun 300 jembatan gantung di Indonesia, 134 unit di antaranya dibangun tahun 2018 dengan anggaran Rp770,5 miliar dan 166 unit lagi akan dibangun pada 2019.